

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KERUGIAN PINJAMAN BERBASIS ONLINE ATAU FINTECH



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:
MAULANA MUHAMMAD ALBAR
C 100 140 307

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KERUGIAN
PINJAMAN BERBASIS ONLINE ATAU FINTECH**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

MAULANA MUHAMMAD ALBAR
C 100 140 307

Telah diperiksa dan di setujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



Dr. Rizka S.Ag. M.H

HALAMAN PENGESAHAN

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KERUGIAN
PINJAMAN BERBASIS ONLINE ATAU FINTECH

Oleh:

MAULANA MUHAMMAD ALBAR

C 100 140 307

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Senin, 28 Desember 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. **Dr. Rizka, S.Ag., M.H.**
(Ketua Dewan Penguji)
2. **Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.**
(Anggota I Dewan Penguji)
3. **Inayah, S.H., M.H.**
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta



Prof. Dr. Khudzaifah Dimyatti, S.H., M.H.)

NIK. 537 / NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat pernah ditulis oleh orang lain kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 28 Desember 2020

Penulis,


Maulana Muhammad Albar
C 100 140 307

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KERUGIAN PINJAMAN BERBASIS ONLINE ATAU FINTECH

Abstrak

Tujuan daripada penelitian ini adalah: a) Untuk mengetahui dasar hukum penyelenggaraan Fintech di Indonesia; b) Untuk mengetahui perlindungan konsumen atas kerugian pinjaman berbasis online atau Fintech Ilegal. Penelitian ini adalah peneelitan yuridis-normatif dan Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, yang dilakukan dengan menelaah peraturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani. Hasil penelitian yang diperoleh adalah Perlindungan hukum bagi Pemberi Pinjaman dapat terwujud secara Preventif berdasarkan Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yaitu dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar bagi Penyelenggara dan perlindungan hukum secara Represif berdasarkan Pasal 37 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Pasal 38 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Penyelenggara wajib memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan sebagai akibat kesalahan atau kelalaian Penyelenggara *Fintech* dalam hal menganalisis dan menyeleksi calon Penerima Pinjaman yang akan diajukan kepada Pemberi Pinjaman. Di Indonesia terdapat beberapa lembaga yang berwenang mengatur industri *Fintech* yaitu: Bank Indonesia (BI); 1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 yang diubah menjadi PBI Nomor 16/8/PBI/2014 dan PBI Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik (PBI *E-Money*). Regulasi KOMINFO terhadap layanan pinjaman uang berbasis *Financial Technology* di Indonesia : 1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang ini mewajibkan setiap pelaku usaha atau penyelenggara untuk bertanggung jawab atas beroperasinya sistem elektronik; 2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan data pribadi dalam sistem Elektronik; 3) POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan yang terakhir perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata.

Kata kunci: *fintech*, landasan hukum *fintech*, perlindungan hukum perjanjian *fintech*

Abstract

The objectives of this research are: a) To find out the legal basis for the implementation of Fintech in Indonesia; b) To find out consumer protection for online loan losses or Illegal Fintech. This research is a juridical-normative research and the approach method used is the statutory approach, which is carried out by examining the rules and regulations related to the legal issues being handled. The result of the research obtained is that legal protection for lenders can

be realized preventively based on Article 29 POJK Number 77 / POJK. 01/2016, namely by applying basic principles for Providers and repressive legal protection based on Article 37 POJK Number 77 / POJK. 01/2016 concerning Information Technology-Based Lending and Borrowing Services and Article 38 POJK Number 1/ POJK. 07/2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector, Providers are required to provide compensation to parties who are injured as a result of mistakes or negligence of the Fintech Organizer in terms of analyzing and selecting prospective Loan Recipients to be submitted to the Lender. In Indonesia, there are several institutions authorized to regulate the Fintech industry, namely: Bank Indonesia (BI); 1) Bank Indonesia Regulation Number 11/12 / PBI / 2009 which was amended to PBI Number 16/8 / PBI / 2014 and PBI Number 18/17 / PBI / 2016 concerning Electronic Money (PBI E-Money).2) Regulation of the Minister of Communication and Information Technology of the Republic of Indonesia Number 20 of 2016 concerning Protection of personal data in Electronic systems; 3) POJK Number 77 / POJK. 01/2016 concerning Information Technology-Based Lending and Borrowing Services and the last is the agreement regulated in the Civil Code.

Keywords: fintech, fintech legal foundation, fintech agreement legal protection

1. PENDAHULUAN

Saat jaman modern ini, tidak sedikit para pelaku usaha dalam bentuk perusahaan atau perorangan. Banyak perusahaan atau perorangan melakukan inovasi usaha. Untuk mendapatkan akses kredit perbankan, pasar modal, peminjaman lembaga keuangan salah satu cara untuk mendapat dana tambahan. Sarana peminjaman sudah menjadi hal yang sering dilakukan oleh masyarakat pada umumnya.

Pinjam meminjam atau peminjaman uang, dikalangan masyarakat sudah menjadi hal yang sering. Definisi pinjam-meminjam menurut Pasal 1754 KUHPerdara menyatakan :

“Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan nama pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah uang yang sama dengan jenis dan mutu yang sama pula.”

Objek perjanjian atau Objek bukti adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum, dan yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi. Prestasi merupakan hal yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak. Prestasi adalah

kewajiban salah satu pihak dan pihak lain berhak untuk menuntut hal itu. Dalam perjanjian, debitur wajib melakukan perbuatan tertentu yang telah ditetapkan dalam perjanjian dan dalam melakukan perbuatan itu debitur harus mematuhi semua ketentuan dalam perjanjian, Debitur bertanggung jawab atas perbuatannya yang tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian.

Upaya meningkatkan indeks keuangan inklusif di Indonesia, Pemerintah telah menyusun strategi Nasional Keuangan Inklusif serta mendirikan Komite Nasional untuk keuangan inklusif yang terdiri dari Presiden, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, dan Kementrian terkait. *Fintech* disebut sebagai salah satu penopang dari lima pilar keuangan inklusif. *Fintech* diharapkan dapat menghadirkan beberapa produk dan jasa keuangan yang mudah dan nyaman untuk masyarakat Indonesia.’’ (Departemen Perlindungan Konsumen OJK,2017).

Seiring dengan perkembangan masa di era globalisasi ini, apapun aktivitas masyarakat tidak akan terlepas dari bantuan teknologi, Begitu pula pada lembaga keuangan yang kini mulai bergeser pada lembaga keuangan berbasis teknologi salah satu kemajuan dalam bidang keuangan saat ini adanya adaptasi fintech . fintech merupakan suatu inovasi pada sektor financial. Inovasi financial ini mendapat sentuhan teknologi modern. Keberadaan fintech dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman .

Diluar negeri sendiri sudah banyak perusahaan yang menyediakan jasa peminjaman uang secara online untuk berbagai kebutuhan mulai dari biaya pendidikan sampai biaya angsuran rumah dan mobil pribadi. Hal ini juga didukung oleh perkembangan teknologi informasi khususnya internet yang semakin pesat, Saat ini jenis pinjaman ini juga semakin menjamur di Indonesia, karena selain proses pinjaman yang relative cepat jika dibandingkan dengan bank atau koperasi simpan pinjam, jangka waktu peminjaman juga bisa diatur sesuai kebutuhan tidak seperti ketika harus meminjam kepada saudara atau teman dekat yang tentunya memiliki jangka waktu terbatas.

Online merupakan suatu istilah yang sering kita gunakan pada saat kita terhubung dengan internet atau juga dunia maya. Sarana pembiayaan lebih

mengarah ke peminjaman secara online. Sehingga syarat dan prosedur pinjam meminjam tidak harus dilakukan secara tatap muka atau secara langsung.

Prosedur pinjam meminjam secara online sangat diberi kemudahan tetapi tidak dipungkiri para pihak menanggung resiko contohnya yang dialami oleh kreditor telah terjadi masalah dalam pelunasan hutang berawal dari debitor yang tidak tepat waktu dalam pelunasan atau wanprestasi. Tidak memenuhinya kewajiban membayar hutang kerugian yang dialami oleh debitor contohnya debitor rugi dalam menanggung bunga yang tidak sesuai seperti perjanjian diawal, kredit peminjaman uang diperlukan kepastian dan yakin kreditor atas kesanggupan dari debitor untuk melunasi hutangnya.

Biarpun pemberi dana sudah menyikapi dengan baik dalam pembiayaan melalui media online tetapi para pihak peminjam uang perlu berhati-hati atas sikap yang dilakukan oleh pihak pemberi dana yang bisa merugikan pihak konsumen. Bahwa telah diatur dalam UUTE terkait mengenai hal-hal yang merugikan konsumen seperti pada pasal 3 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE):

“Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan atas hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.”

Pasal 28 ayat (1) UU ITE menyatakan: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.”

Tingginya jumlah keluhan dan pengaduan konsumen via Bidang Pengaduan YLKI pada 2019 juga menjadi bukti fenomena tersebut. Pada 2019, YLKI telah menerima 1.871 aduan, terdiri atas 563 kasus kategori individual dan 1.308 kasus kategori kelompok/kolektif. Sepuluh besar pengaduan konsumen individual (563 aduan) meliputi masalah perbankan (106 kasus), pinjaman online (34), transportasi (26), kelistrikan (24), telekomunikasi (23), asuransi (21), dan pelayanan public (15). Yang paling memprihatinkan adalah pengaduan konsumen soal pinjaman online, dengan korban mayoritas masyarakat kecil/miskin. Bahkan dampak dari masalah ini telah memakan korban jiwa (bunuh diri), perceraian,

dan pemecatan oleh perusahaannya. Konsumen terjerat masalah ini umumnya dari cara penagihan juru tagih yang meneror konsumen atau memperlmalukannya di mata saudara, teman dekat, atasan, dan kolega di kantor. Menurut catatan YLKI, mayoritas Pelaku usaha pinjaman online yang diadukan adalah pelaku usaha ilegal (54) pelaku. Namun ada juga 17 pelaku usaha yang legal atau terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Walau OJK mengeklaim telah memblokir pengusaha ilegal, buktinya korbannya masih cukup marak. Tragisnya korban adalah masyarakat menengah kebawah (orang miskin) yang terjerat bunga berbunga yang sangat tinggi dan denda harian yang mencekik leher , sehingga konsumen harus membayar lebih dari 100 persen utang pokoknya.

Kepastian hukumnya juga apabila terjadi suatu sengketa. Pihak penyelenggara, pemberi maupun penerima pinjaman harus taat terhadap UU OJK maupun peraturannya lainnya, namun juga perlu memperhatikan asas yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 UU perlindungan konsumen yaitu berisikan asas: manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Apabila perusahaan atau fintech beroperasi sesuai ketentuan atau aturan yang berlaku maka berpotensi kecil untuk terjadinya risiko kerugian yang harus ditanggung baik oleh pihak penyelenggara, pemberi, dan penerima pinjaman.

Berdasarkan uraian diatas, dianggap perlu bagi penulis untuk mengadakan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KERUGIAN PINJAMAN BERBASIS ONLINE ATAU FINTECH”

Rumusan masalah adalah berupa rumusan dalam bentuk kalimat yang tidak terlalu panjang dan bersifat pernyataan. Berangkat dari latar belakang diatas maka merumuskan beberapa masalah sebagai berikut : a) Apa sajakah yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan Fintech di Indonesia ? b) Bagaimana perlindungan konsumen atas kerugian pinjaman berbasis online atau Fintech Ilegal ?

Penelitian ini adalah peneelitan yuridis-normatif yaitu penlitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang mnggunakan objek kajian penulisan berupa pustaka-pustaka yang ada, sehingga penulisan ini juga bersifat penulisan pustaka. Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan

perundang-undangan, yang dilakukan dengan menelaah peraturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani, yaitu dengan mengkaji permasalahan dari segi hukum yang terdapat dalam peraturan otoritas jasa keuangan, undang-undang perlindungan konsumen, undang-undang informasi dan transaksi elektronik serta dari pustaka yang relevan dengan pokok bahasan.

2. METODE

Metode penelitian ini merupakan suatu keinginan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jelas menganalisisnya. Sedangkan, penelitian adalah metode ilmiah yang dilakukan melalui penyidikan secara seksama dan lengkap terhadap semua bukti-bukti yang dapat diperoleh mengenai suatu permasalahan tertentu sehingga dapat diperoleh melalui suatu permasalahan itu.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan Konsumen Atas Kerugian Pinjaman Berbasis Online Atau Fintech

Seiring dengan tumbuh pesatnya bisnis layanan keuangan berbasis teknologi atau *Financial Teknologi*, tentu harus diimbangi juga dengan hadirnya regulasi dan pengawasan yang jelas terhadap berjalannya bisnis tersebut. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Pasal 6 menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap : a) Kegiatan jasa keuangan disektor perbankan; b) Kegiatan jasa keuangan disektor Pasar Modal; c) Kegiatan jasa keuangan disektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Keuangan lainnya. Apabila mengacu pada kedua pasal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan adalah instansi yang melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap tumbuh kembangnya industri *Fintech*, salah satunya layanan pinjaman uang berbasis *Fintech* atau *Fintech P2PL* yang

merupakan bagian Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Upaya perlindungan konsumen terhadap penyelenggaraan *Fintech P2PL* di Indonesia saat ini terdapat peraturan yang mengatur terhadap penyelenggaraan kegiatan ini, pelaku usaha atau penyelenggara *Fintech P2PL* wajib memperhatikan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.07/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini meliputi kelembagaan, pendaftaran, perizinan, batasan pemberian pinjaman dana, tata kelola teknologi informasi penyelenggara, batasan kegiatan, manajemen resiko, laporan serta edukasi perlindungan konsumen.

Berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam transaksi pinjam meminjam uang berbasis teknologi, bahwa konsumen juga mempunyai hak yang diutarakan oleh Ahmadi Miru, sebagai berikut : a) Hak dalam mencegah konsumen dari kerugian baik kerugian personal atau kekayaan; b) Hak dengan harga wajar dalam mendapatkan barang dan jasa; c) Hak dalam mendapatkan penyelesaian yang patut terhadap masalah yang dihadapi.

Hak menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) bagi Produsen, sebagai berikut : 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; 2) Hak untuk memilih barang dan/jasa serta mendapatkan barang dan/ atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan; 5) Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut; 6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen; 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan

perundangundangan lainnya. Selain hak yang diterima, konsumen juga memiliki kewajiban diantaranya :1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa, demi keamanan dan keselamatan; 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa; 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Berhubungan dengan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* perlu regulasi dan pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan. Jumlah Penyelenggara yang terdaftar sampai dengan periode triwulan IV-2019 sebanyak 164 entitas, dengan jumlah pinjaman tersalurkan sebesar Rp81,5 triliun atau naik 34,93% dari periode sebelumnya sebesar Rp60,4 triliun. Sementara itu TWP 90 yaitu ukuran tingkat wanprestasi atau kelalaian penyelesaian kewajiban yang tertera dalam perjanjian di atas 90 hari sejak tanggal jatuh tempo pada periode laporan adalah sebesar 3,65%

Perlindungan hukum bagi Pemberi Pinjaman dapat terwujud secara Preventif berdasarkan Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yaitu dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar bagi Penyelenggara dan perlindungan hukum secara Represif berdasarkan Pasal 37 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Pasal 38 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor

Jasa Keuangan, Penyelenggara wajib memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan sebagai akibat kesalahan atau kelalaian Penyelenggara *Fintech* dalam hal menganalisis dan menyeleksi calon Penerima Pinjaman yang akan diajukan kepada Pemberi Pinjaman. Saran yang penulis berikan untuk dapat mengatasi persoalan dikemudian hari adalah peran OJK dalam mengatur dan mengawasi perkembangan *Fintech* di Indonesia harus lebih dipertegas dalam menerapkan regulasi dengan fakta yang sebenarnya terjadi. Perusahaan rintisan *Fintech* yang belum terdaftar OJK juga harus mendapatkan perhatian karena menjadi sarana terbaik untuk melakukan pencucian uang dengan aman tanpa adanya pengawasan dari pemerintah. OJK harus lebih banyak memperkenalkan

serta memberikan edukasi mengenai pelayanan *Fintech* agar dapat dimanfaatkan terutama bagi *unbanked people*. Selain itu, OJK dapat membuat regulasi untuk membentuk lembaga penyelesaian sengketa *Financial Technology* di Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan yang menjadi pemimpin Satgas Waspada Investasi melakukan strategi penanganan *fintech lending* ilegal dengan tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif dilakukan dengan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar terhindar dari *fintech lending illegal*. Tindakan represif yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan selama ini adalah menghentikan kegiatan *fintech lending* ilegal dan mengumumkan daftarnya ke masyarakat. Melakukan pemblokiran aplikasi atau situs melalui Kemenkominfo.

Wakil Ketua Umum Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Sunu Widyatmoko sepakat, masyarakat hanya boleh menggunakan layanan *fintech lending* terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, masyarakat harus memperhatikan segala administratif termasuk persyaratan, bunga, dan denda setiap *fintech lending*. Informasi tersebut bisa diperoleh masyarakat di situs masing-masing perusahaan. Setelahnya, masyarakat harus mengukur kemampuan diri sendiri.”Kalau dari bunga itu merasa tidak mampu membayar, ya jangan pinjam,” kata Sunu.¹⁴ Dalam upaya menjamin kepastian hukum saat ini OJK bersama dengan asosiasi dan penyelenggaraan *Fintech P2PL* yang saat ini telah terdaftar sedang menyusun mengenai standar mekanisme pelaksanaan *Internal Dispute Resolution* (IDR) dan *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Tujuannya agar konsumen pengguna layanan *P2PL* mendapatkan kejelasan atau kepastian hukum atas penanganan pengaduan dan sengketannya. Selain itu, salah satu hal yang dapat dipertimbangkan untuk pelaksanaan penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa pada penyelenggaraan *Fintech P2PL* adalah *Online Dispute Resolution* (ODR). ODR merupakan sistem penyelesaian sengketa yang memanfaatkan sarana teknologi informasi, contohnya seperti telepon, email, aplikasi, *webchat*, dan *video conference*.

Kian pesatnya persaingan dalam merebut mangsa pasar melalui bermacam- macam produk barang, maka perlu keseriusan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) perlu memantau secara serius pelaku usaha/penjual yang hanya mengejar profit semata dengan mengabaikan kualitas produk barang. Berkaitan dengan implementasi perlindungan konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengatur tugas dan wewenang LPKSM sebagaimana tertuang dalam Pasal 44, yaitu: Pemerintah mengakui LPKSM yang memenuhi syarat, LPKSM memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen, Tugas LPKSM meliputi kegiatan; a) Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengonsumsi barang/jasa; b) Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukan; c) Bekerjasama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen; d) Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya; e) Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

Syarat sah perjanjian dalam KUHPerdata ada kesepakatan antara kedua belah pihak penyelenggara dengan pemberi pinjaman ataupun penyelenggara dengan penerima pinjaman dalam *Peer To Peer Lending* yang telah berizin dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan secara Hukum sah saja dengan syarat subjektif atau kecakapan dan syarat obyektif atau suatu sebab yang halal telah terpenuhi.

3.2 Regulasi Terhadap *Financial Technology* Berbasis Online *Peer To PeerLending*

Di Indonesia terdapat beberapa lembaga yang berwenang mengatur industri *Fintech* yaitu:

3.2.1 Bank Indonesia (BI); a) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 yang diubah menjadi PBI Nomor 16/8/PBI/2014 dan PBI Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik (PBI *E-Money*);¹⁷; b) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran; c) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial; d) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor

19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (Regulacy Sandbox) Teknologi Finansial; e) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/15/PADG/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial. Di Indonesia, regulator telah mengeluarkan regulasi, pelaksanaan edukasi, dan pengawasannya. Sebagai contoh, Bank Indonesia (BI) telah meresmikan *Fintech Office* (dilengkapi dengan *regulatory sandbox*) yang berfungsi sebagai katalisator atau fasilitator, *business intelligence*, *asesmen*, serta koordinasi dan komunikasi.

Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran sebagai payung hukum bagi pengembangan bisnis *Fintech* di Indonesia. Perlindungan hukum bagi nasabah dan pelaku usaha *Fintech* diatur dalam UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, PP Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, PBI Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Penyelenggara Sistem Pembayaran, dan PBI Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran Pelaku usaha yang ingin menjadi Penyedia Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) untuk pertama kali, harus mendapat izin dari Bank Indonesia. PJSP yang ingin mengembangkan usaha harus mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.

3.2.2 Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO)

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia disingkat KOMINFO adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan komunikasi dan informatika. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebelumnya bernama Departemen Penerangan (1945-1999), Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi (2001-2005), dan Departemen Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo). Regulasi KOMINFO terhadap layanan pinjaman uang berbasis *Financial Technology* di Indonesia

- a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang ini mewajibkan setiap pelaku usaha atau penyelenggara untuk bertanggung jawab atas beroperasinya sistem elektronik.

- b) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan data pribadi dalam sistem Elektronik
- c) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang sistem manajemen pengamanan informasi
- d) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

3.2.3 Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Setelah berlakunya POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, OJK telah mengeluarkan ketentuan tentang pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko teknologi informasi pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi dalam Surat Edaran Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 18/SEOJK.02/2017 yang mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu 18 April 2017.

Sebagaimana amanah yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan harus mampu melindungi konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Peran aktif dari para Otoritas pengaturan dan pengawasan terkait sangatlah diperlukan untuk menyusun pengaturan dan melakukan pengawasan produk dan layanan *Fintech* dengan tetap memerhatikan aspek perlindungan konsumen. (Departemen Perlindungan Konsumen OJK, 2017).

Syarat awal yang ditentukan oleh Aplikasi *Fintech Peer to Peer Lending* merupakan syarat subyektif, dimana jika syarat tersebut tidak terpenuhi maka salah satu pihak dapat meminta supaya perjanjian dibatalkan, namun apabila para pihak tidak ada yang keberatan, maka perjanjian tetap dianggap sah. Syarat ketiga dan keempat merupakan syarat obyektif, dimana bila tidak terpenuhi maka

perjanjian tersebut batal demi hukum.

Syarat utama yang ditentukan terkait dengan ketentuan peminjaman merupakan bagian dari asas konsensualisme, perjanjian terbentuk karena adanya pertemuan kehendak (*consensus*) dari para pihak. Perjanjian pada pokoknya dapat dibuat bebas, tidak terikat bentuk dan tidak tercapai secara formil tetapi melalui konsensus belaka. Pada konsensualisme ini diatur pada Pasal 1320 butir 1 yang berarti pada asasnya perjanjian itu timbul atau sudah dianggap lahir sejak detik tercapainya konsensus atau kesepakatan. Perjanjian sudah sah dan mempunyai akibat hukum sejak saat tercapai kata sepakat antara para pihak, mengenai pokok perjanjian. Kesimpulan dari asas ini adalah bahwa perjanjian dibuat itu dapat secara lisan maupun tulisan berupa akta jika dikehendaki sebagai alat bukti.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.1.1 Perlindungan Konsumen Atas Kerugian Pinjaman Berbasis Online Atau Fintech

Perlindungan hukum bagi Pemberi Pinjaman dapat terwujud secara Preventif berdasarkan Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yaitu dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar bagi Penyelenggara dan perlindungan hukum secara Represif berdasarkan Pasal 37 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Pasal 38 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Penyelenggara wajib memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan sebagai akibat kesalahan atau kelalaian Penyelenggara *Fintech* dalam hal menganalisis dan menyeleksi calon Penerima Pinjaman yang akan diajukan kepada Pemberi Pinjaman. Saran yang penulis berikan untuk dapat mengatasi persoalan dikemudian hari adalah peran OJK dalam mengatur dan mengawasi perkembangan *Fintech* di Indonesia harus lebih dipertegas dalam menerapkan regulasi dengan fakta yang sebenarnya terjadi. Perusahaan rintisan *Fintech* yang belum terdaftar OJK juga harus mendapatkan perhatian karena menjadi sarana terbaik untuk melakukan pencucian uang dengan aman tanpa adanya pengawasan dari pemerintah. OJK harus lebih banyak memperkenalkan serta memberikan edukasi

mengenai pelayanan *Fintech* agar dapat dimanfaatkan terutama bagi *unbanked people*. Selain itu, OJK dapat membuat regulasi untuk membentuk lembaga penyelesaian sengketa *Financial Technology* di Indonesia.

4.1.2 Regulasi Terhadap *Financial Technology* Berbasis Online *Peer To Peer Lending*

Di Indonesia terdapat beberapa lembaga yang berwenang mengatur industri *Fintech* yaitu: Bank Indonesia (BI); 1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 yang diubah menjadi PBI Nomor 16/8/PBI/2014 dan PBI Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik (PBI *E-Money*); 2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran; 3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial; 4) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (Regulacy Sandbox) Teknologi Finansial; 5) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/15/PADG/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial. Regulasi KOMINFO terhadap layanan pinjaman uang berbasis *Financial Technology* di Indonesia : 1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang ini mewajibkan setiap pelaku usaha atau penyelenggara untuk bertanggung jawab atas beroperasinya sistem elektronik; 2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan data pribadi dalam sistem Elektronik; 3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang sistem manajemen pengamanan informasi; 4) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan yang terakhir perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara.

4.2 Saran

Untuk legislatif dan eksekutif, diharapkan kedepannya regulasi mengenai *fintech*

dapat lebih sedikit dengan substansi yang komprehensif sehingga tidak terjadi tumpang tindih antar lembaga yang mengatur. Hal ini akan memberikan efektifitas dan efisiensi dalam kinerja. Untuk konsumen, diharapkan kedepannya lebih teliti dalam memilih *fintech* sebagai sarana untuk melakukan transaksi, hal ini agar tidak menimbulkan kerugian dikemudian harinya. Konsumen diharapkan lebih aktif menggali informasi terhadap *fintech* yang sudah memiliki lisensi dalam beroperasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul KADIR Muhammad, 1982, *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni.
- Ahmadi Miru, 2000, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Surabaya : Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, hal. 140.
- Ernasari,dkk. *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Teknologi (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)*, Diponegoro law Journal Vol.6,2017.
- Evi Ariyani, 2013, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Ombak.
- [http://pengajar.co.id/pengertian-online-ciri-kekurangan-dan-kelebihannya/akses10/03/2020 01:58](http://pengajar.co.id/pengertian-online-ciri-kekurangan-dan-kelebihannya/akses10/03/2020%2001:58)
- <http://economy.okezone.com/amp/2019/10/24/320/2121090/ojk-tidak-tolerir-operasional-fintech-ilegal?page=2> Akses 29/04/2020 pukul 21:57 WIB.
- http://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/view/id/553/t/peraturan+menteri+komunikasi+dan+informatika+nomor+20+tahun+2016+tanggal+1+desember+2016. Akses28/04/2020 pukul 16.08 WIB.
- <http://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/krisnab/5cdb3ce495760e08be46e982/cara-menghadapi-jerat-pinjam-dan-teror-dept-collector-dari-fintech-ilegal> Akses 29/04/2020 pukul 22:07 WIB.
- [http://koinworks.com/blog/perkembangan-pinjaman-online/akses10/03/2020 01:37](http://koinworks.com/blog/perkembangan-pinjaman-online/akses10/03/202001:37) <https://www.ojk.go.id/id/data-dan-statistik/laporan-triwulanan/Pages/Laporan-Triwulan-IV---2019.aspx> diakses 27/04/2020 pukul 12.32 WIB.
- Lingkar Konsumen Rabu, 19 November 2016, 20:00 WIB : *Tugas dan Wewenang LPKSM*, dalam <http://www.lingkarkonsumen.com/2016/11/tugas-dan-lpksm.html>, diakses Rabu 3 Juni 2020 pukul 21:40.
- Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni Bandung, Bandung,hlm 90.
- Mariam Darus, 2005, *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*,Bandung: PT. Alumni, hal. 89
- Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

POJK Nomor 77/POJK 01 2016 Tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, Pasal 1 angka 6.

R. Subekti, 2001, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa. Rinitami Njatrijani, "PERKEMBANGAN REGULASI DAN PENGAWASAN FINANCIAL

Samir, S., dan Rahmizal, M. (2017). *Developing Islamic Financial Technology In Indonesia*, 1 (2), hlm. 130

Sari, A. R, from <http://e-journal.uajy.ac.id/JURNAL.pdf>

Sari, A. R. *Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Di Indonesia*. Yogyakarta. Retrived from <http://e-jurnal.uajy.ac.id/14649/1/JURNAL.pdf> akses 27/04/2020 22.33 WIB.

Technology di Indonesia", *Diponegoro Private Law Review*, Vol 4 NO 1 Tahun 2019 (Februari, 2019), hal. 468.

Ylki.or.id/2020/01/pengaduan-konsumen-dan-kinerja-ojk/